



PAPER – OPEN ACCESS

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Author : Woro Titi Haryanti
DOI : 10.32734/lwsa.v2i2.728
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Library Based on Social Inclusion

Woro Titi Haryanti

*Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*

worotiti@gmail.com

Abstrak

Tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi tempat pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan harus memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, keinginan menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan usaha, melindungi dan melestarikan budaya dan Hak Azasi Manusia dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan wujud perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Di mana perpustakaan bukan hanya sebagai pusat sumber informasi tetapi lebih dari itu sebagai tempat mentransformasikan diri sebagai pusat sosial budaya dengan memberdayakan dan mendemokratisasi masyarakat dan komunitas lokal, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: transformasi perpustakaan, inklusif sosial

Abstract

The objective of the library transformation policy based on social inclusion is to increase information literacy based on Information and Communication Technology, improve the quality of life and welfare of the community, strengthen the role and function of the library, so that it is not just a place for storing and borrowing books, but a place for lifelong learning and community empowerment. Libraries must facilitate the community in developing their potential by looking at cultural diversity, change, and offering business opportunities, protecting and preserving culture and human rights and in accordance with the goals of sustainable development. Transforming libraries based on social inclusion is a form of library as lifelong learning. Where the library is not only as a source of information but more than that as a place to transform yourself as a center for social culture by empowering and democratizing the community and local communities, in an effort to improve the welfare of the community.

Keywords: library transformation, social inclusion

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Perpustakaan Indonesia adalah mengemban amanat negara yang termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan Nasional juga andil dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif dan inovatif sesuai program 9 Nawacita menuju Indonesia hebat dengan cara :

- mengembangkan SNP, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat,serta menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air.
- 6 Fungsi Perpustakaan (perpustakaan pembina, deposit, rujukan, penelitian, pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan)

Hal ini sejalan dengan misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan membuat resolusi pembangunan bersama hingga tahun 2030 mendatang yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia, SDGs diartikan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat 17 tujuan dan 169 capaian yang terukur dan disepakati oleh 193 negara. Tujuan itu berupa mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan peradaban yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dari 17 capaian itu sebagian besar merupakan program yang sedang digaungkan oleh Perpustakaan di Seluruh Indonesia. Program itu dikenal dengan *Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Konsep Inklusi sosial pertama kali muncul pada tahun 1970-an di Prancis sebagai respons terhadap krisis kesejahteraan di negara-negara Eropa. konsep ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru Eropa sepanjang tahun 1980-an hingga 1990-an. Pada tanggal 6-12 Maret 1995, bertempat di Copenhagen Denmark, diadakanlah sebuah Konferensi Tingkat Tinggi *World Summit For Social Development* kemudian dikenal dengan sebutan *Copenhagen Declaration On Social Development*. Pada pertemuan di Copenhagen ini, para pemimpin dunia berjanji menanggulangi kemiskinan, mendorong masyarakat yang stabil, aman dan adil bagi masyarakat sebagai tujuan utama dalam pembangunan.

Setelah diterapkan pada perpustakaan, istilah ini menjadi sebuah agenda pembangunan nasional di bidang perpustakaan dengan nama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Kementerian PPN/BAPENAS juga sudah mengesahkan kebijakan ini di tahun 2018. Pada tahun 2019, BAPENAS memberikan target kepada perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan yang berbasis inklusi sosial sebanyak 300 lokasi dengan anggaran 145 miliar rupiah di tambah DAK sebesar 300 miliar.

2. Pembahasan

Tujuan Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis TIK, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan Perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia. Sesuai dengan tujuan SDGs.

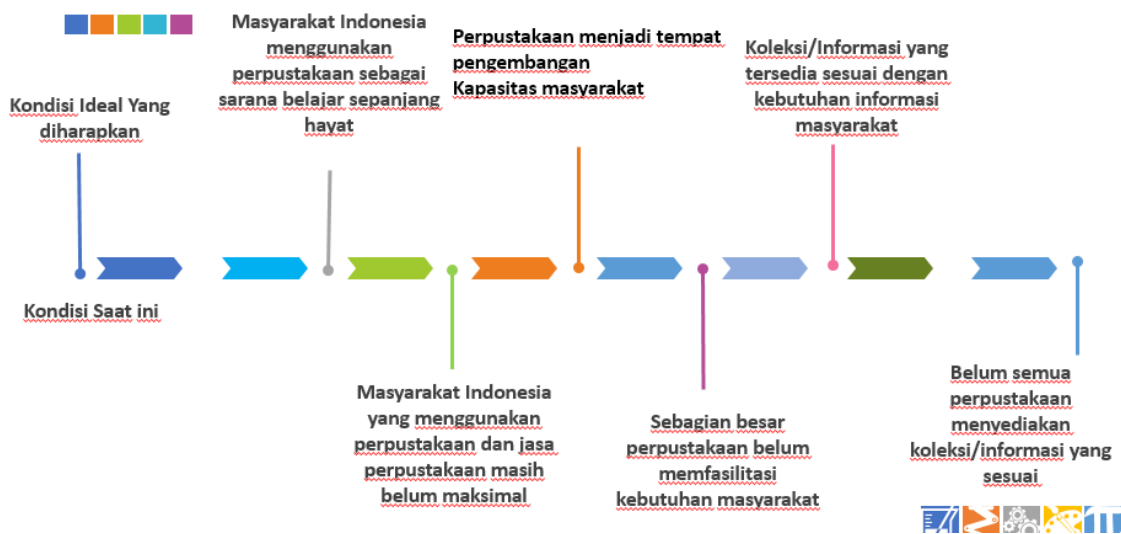
Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan wujud perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Di mana perpustakaan bukan hanya sebagai pusat sumber informasi tetapi lebih dari itu sebagai tempat mentransformasikan diri sebagai pusat sosial budaya dengan memberdayakan dan mendemokratisasi masyarakat dan komunitas lokal, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum layanan perpustakaan sebagai hak inklusif bagi masyarakat termaktub dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat terhadap perpustakaan, yaitu:

- Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus;
- Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing

Perkembangan perpustakaan di Indonesia jika dilihat dengan kondisi perpustakaan dan masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu

1. Kondisi perpustakaan dan masyarakat saat ini
 - a. Masyarakat Indonesia yang menggunakan perpustakaan dan jasa perpustakaan masih belum maksimal
 - b. Sebagian besar perpustakaan belum memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat
 - c. Belum semua perpustakaan menyediakan koleksi/informasi yang sesuai
2. Kondisi ideal perpustakaan dan masyarakat yang diharapkan
 - a. Masyarakat Indonesia menggunakan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat
 - b. Perpustakaan menjadi tempat pengembangan kapasitas masyarakat
 - c. Koleksi/informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat



Gambar 1. Kesenjangan Perpustakaan dan Masyarakat

Perpustakaan bukan hanya sebagai pusat sumber informasi tetapi lebih dari itu perpustakaan juga tempat mentransformasikan diri sebagai pusat sosial budaya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat dan perpustakaan sebagai pusat informasi, ada tiga hal yang harus menjadi fokus perhatian, yaitu berkenaan dengan *Connectivity*, *Content* dan *Human*. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui perpustakaan sebagai sumber informasi publik, maka pendekatan *Connectivity*, *Content*, dan *Human* dapat dikaji dengan melihat akar masalah, solusi, dampak dan hasil yang akan tercapai, seperti terlihat pada Gambar-2 berikut.



Gambar-2. Kesejahteraan dan Sumber Informasi

Percepatan peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan perpustakaan menjadi kegiatan prioritas pertama Perpustakaan Nasional. Perpustakaan memiliki peran untuk mendukung kegiatan prioritas Penguatan Literasi untuk mendorong peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Inklusi sosial adalah pendekatan berbasis *system social approach* atau pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*). Pendekatan inklusif memandang perpustakaan merupakan sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Untuk itu, perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kebermanfaatannya yang tinggi di masyarakat. Melalui pendekatan inklusif perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Deklarasi *World Summit of Information (WSIS)* tahun 2003 menyatakan bahwa membangun masyarakat yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang proaktif membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial. Perpustakaan juga mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk belajar di perpustakaan. Perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia dapat dikatakan perpustakaan tersebut sudah berbasis inklusi sosial.

Menurut Karen Philip [2] untuk menjadikan perpustakaan menjadi lebih inklusi di tangan masyarakat, maka diperlukan upaya:

- *Make the library a welcoming place*
- *Being kind, personable, and compassionate can go a long way*
- *Librarians also need to understand their users, free from preconceived assumptions.*
- *We need to listen*
- *We need to re-imagine how our library needs to look to accommodate user needs*

Peran perpustakaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara:

- Ketersediaan dan kemudahan akses bahan pustaka dan sumber informasi bermutu untuk masyarakat
- Masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan untuk berbagi pengalaman dan melatih keterampilan agar peroleh keahlian & pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan
- Perpustakaan menjadi ruang sinergitas kegiatan kemasyarakatan di daerah, agar manfaat dan dampak perpustakaan di masyarakat lebih optimal

3. Kesimpulan

Melihat begitu besarnya peran perpustakaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka apakah perpustakaan di Indonesia sudah siap untuk bertransformasi ?. Pertanyaan ini setidaknya menjadi pemicu bagi penyelenggara perpustakaan dalam menghadapi sberagamnya tingak sosial budaya di tengah masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan sudah saatnya bertransformasi, antara lain transformasi fungsi, fasilitas, pustakawan dan pemustaka.

Transformasi Fungsi berarti perpustakaan berfungsi sebagai (1) *Getting the right information to the right people in the right format at the right time so as to influence decision-making*; (2) *Moving knowledge into active service for the broadest possible common good*; (3) *The process from the creation of evidence to its ultimate impact*; and (4) *Collaborative problem-solving between researchers and decision makers that happens through linkage and exchange*.

Trasformasi Fasilitas berarti perpustakaan tetap mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, antara lain: (1) *Information-searched to information-pushed (informasi sudah tersedia di hadapan pengguna)*; (2) *Industrial-economy to Information-economy and to Knowledge-Economy Formal Learning to Lifelong Learning*; (2) *Mass-production to Customized-production*; (3) *Internet – Global Network*; (4) *High Speed Computing – Distributed System*; (5) *Mobile Computing*; and (6) *Cloud Computing*. Teknologi informasi dan komunikasi secara umum telah membawa perubahan yang sangat besar pada perkembangan masyarakat.

Transformasi Pustakawan berarti (1) Pustakawan merupakan agen perubahan; (2) Pustakawan merupakan poros informasi, yang harus terus dijalankan dari masa lalu, masa kini hingga ke masa yang akan datang; (3) Berperan dalam pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemajuan sosial dan ekonomi; (4) Berdedikasi tinggi dan bekerja secara profesional; (5) Menyatu, membaaur dan memberikan sesuatu perubahan yang baru yang lebih baik; (6) Terbuka dan membuka pikiran.

Pustakawan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat berarti mampu:

- Membaca perubahan masyarakat dan mendorong perpustakaan untuk menyesuaikan dengan kemauan masyarakat tanpa menghilangkan esensi perpustakaan
- Berinovasi dan berkreasi
- Berorientasi maju ke depan
- Terlibat dalam aktivitas masyarakat
- Mendiskusikan berbagai pengetahuan dalam masyarakat dengan tujuan menemukan pemahaman dan pengetahuan baru untuk masyarakat.
- Menganalisa kebutuhan masyarakat dan menjadikan perpustakaan sebagai basis menemukan solusi dari kebutuhan masyarakat.
- Menyebarkan hasil ke seluruh masyarakat

Transformasi Pemustaka berkaitan dengan :

1. Digital Native, yaitu generasi yang terbiasa dengan lingkungan *digital* atau teknologi *digital* dan *internet*. Generasi *digital natives* menghabiskan banyak waktunya dalam dan untuk menggunakan berbagai macam peralatan dari era digital.
2. Digital Immigrant, generasi yang lahir tidak pada era digital tetapi hidup pada era digital dan berusaha untuk belajar dan beradaptasi dengan berbagai hal dan aspek dari teknologi baru.

Referensi

- [1] Gidley, J. M., Hampson, G. P., Wheeler, L., Bereded-Samuel, E. Social Inclusion: Context, Theory and Practice. The Australasian Journal of University_Community Engagement, vol.5, no. 1. 2010.
- [2] Karen P. How to Make the Library More Inclusive Available from: <https://www.libraryjournal.com/?detailStory=how-to-make-the-library-more-inclusive?> 2018.
- [3] Kenneth Williment. It takes a Community to Create a Library. the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research. 2009; 4(1).
- [4] Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/ Kelurahan
- [5] Paul Sturges. Understanding cultures, and IFLA's Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE) core activity). 2004.